



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa 18 Februari 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan

Modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melakukan aksinya melalui pesan WhatsApp, telepon, maupun SMS.

M Saiful Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

HAL ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipu mengaku dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo dan menawarkan bantuan untuk mengaktifasi IKD.

Korban yang dihubungi diminta untuk menyerahkan data pribadi mereka untuk proses aktivasi IKD. Namun, data pribadi yang diperoleh digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan tindak kejahatan.

"Atas maraknya kejahatan tersebut, Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat imbauan untuk waspada terhadap penipuan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo," ujar Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, pada Senin (17/2/25).

Dalam surat tersebut, Pemkab Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati. Masyarakat diminta untuk waspada jika dihubungi oleh seseorang yang menawarkan



WASPADA: Pak Bupati Sidoarjo saat mengecek Identitas Kependudukan Digital ke warga.

bantuan untuk aktivasi IKD. "Jangan percaya meskipun oknum penipu tersebut mengaku sebagai pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo," pesan Sekda.

Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala

Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, serta Kepala Desa atau Lurah se-Kabupaten Sidoarjo. Surat yang dikeluarkan pada 13

Februari 2025 ini diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, disampaikan beberapa informasi agar masyarakat tidak

Ke Halaman 10

Rumah Tidak Layak Huni Milik Salamin Mulai Diperbaiki

SIDOARJO - Pasca viral diberitakan di media terkait kondisi rumahnya yang bocor dan atap bocor setiap hujan turun, rumah tidak layak huni (RTLH) milik Pak Salamin (70), warga RT 6 RW 2, Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, kini sudah dalam perbaikan, Senin (17/2/25).

Sebelumnya diberitakan, RTLH milik warga Desa Randegan mendapat perhatian dengan didatangi Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni, bersama anggota Komisi D, H. Moch. Dhamroni, dan perwakilan Dinas Sosial serta Baznas (Badan Zakat Nasional).

Kini Salamin sudah bisa bernapas lega dan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada banyak pihak setelah rumahnya mulai diperbaiki.

Selamin (70), warga Desa Randegan, RT 6 RW 2, Kecamatan Tanggulangin, pemilik RTLH yang kini sudah direnovasi melalui program perbaikan RTLH, menyampaikan rasa sangat berterima kasih.

"Saya ingin tidak sampai kebocoran, pintu-pintu sudah rapih semua. Dan saya sampaikan terima kasih serta syukur kepada Allah SWT, kepada pemerintah

Kabupaten Sidoarjo yang sudah membantu, khususnya Kepala Dinas Sosial dan Baznas Sidoarjo, sehingga rumah saya bisa dibangun sesuai dengan jaringnya yang insyaallah sebelum Lebaran," terang Salamin, Senin (17/2/25).

"Jadi intinya saya sangat senang dengan bantuan perbaikan rumah yang saat ini sudah dikerjakan mulai Sabtu kemarin, sehingga tidak bocor lagi," ucap Salamin.

M. Lazim, Ketua RT 6 RW 2 Desa Randegan, kepada Duta Masyarakat, Senin (17/2/25), mengatakan, "Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak yang ikut memperhatikan dan membantu jalannya proses pengajuan bantuan renovasi rumah terkait rumah tidak layak huni (RTLH) bagi setiap warga kurang mampu, khususnya warga di sini."

"Karena harapan warga tersebut kini sudah terealisasi dengan dibangunnya dua rumah warga kami," ungkap M. Lazim.

"Harapannya semoga program yang baik tersebut bisa berjalan lancar dan berkembang terus dalam hal kualitas, sehingga bisa benar-benar dinikmati oleh setiap warga yang membutuhkan," harap M. Lazim. ● Loe



Pak Salamin menunjukkan RTLH miliknya yang sedang diperbaiki Senin (17/2/25).

Siap Dilantik, Subandi-Mimik Komitmen Efisiensi Anggaran

Juga Dukung Program Ketahanan Pangan

SIDOARJO - Pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Sidoarjo Subandi-Mimik idayana memastikan kesiapannya menjelang pelantikan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Setelah menjalani tes kesehatan, keduanya dinyatakan sehat dan siap memimpin Sidoarjo.



DINYATAKAN SEHAT: Subandi (foto kanan) dan Mimik idayana mengikuti tes kesehatan di Kemendagri.

"Alhamdulillah semua lancar dan hasilnya baik," ujar Subandi didampingi Mimik idayana dalam keterangannya kepada media. Usai dilantik, Subandi dan Mimik akan mengikuti retret di Magelang bersama kepala daerah lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan

orientasi dan pembekalan bagi para pemimpin daerah. Jelang dilantik, kepala daerah diminta komitmen untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. "Kami siap men-

jalankan semua perintah dan kebijakan yang diambil untuk bangsa," katanya. Selain itu, Subandi menyatakan kesiapan mendukung program ketahanan pangan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Dalam upaya efisiensi, Pem-

kab Sidoarjo bersama DPRD telah sepakat menghapus anggaran kegiatan seremonial yang dinilai tidak efisien. Selain itu, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat. "Kami ber-

terima kasih kepada DPRD Sidoarjo. Komunikasi antartim anggaran pemerintahan daerah dan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo juga berjalan lancar dan efisiensi ini sudah disepakati bersama," tandas Subandi. (uzi/fal)

Nasional Retret, Kada Dilarang Bawa Ajudan

Hasil Tes Kesehatan, Banyak Kepala Daerah Berkeolesterol Tinggi

JAKARTA - Para kepala daerah (kada) terpilih telah menuntaskan pengecekan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin (17/2). Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan menjelang pelantikan serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2) dan retret di Magelang pada 21-28 Februari.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, dari 962 kepala daerah dan wakilnya yang akan dilantik, hanya 17 yang berhalangan hadir karena berbagai alasan. Mereka akan mengikuti tes kesehatan susulan di Magelang. Bima mengatakan, hasil pengecekan kesehatan akan menjadi dasar dalam menentukan aktivitas fisik di Magelang. Mereka yang



HARI KEDUA: Wamendagri Bima Arya (kanan) memimpin pemeriksaan kesehatan terhadap kepala daerah terpilih di kantor Kemendagri Jakarta kemarin (17/2).

melaksanakan operasi dalam enam bulan terakhir, misalnya, akan mendapat catatan khusus. "Karena kesehatan yang utama," ujarnya kemarin.

Secara umum, para kepala daerah dalam kondisi sehat. Kalaupun ada catatan, angka kolesterol tinggi. Ini dialami sekitar 30 persen kada. "Ada juga yang angka asam urat dan kadar gula agak sedikit di atas," imbuhnya.

Setelah tes kesehatan, hari ini para kepala daerah akan melaksanakan gladi kotor pelantikan di Monas. Lalu dilanjutkan gladi bersih pada Rabu besok. Total ada 481 kepala daerah yang akan dilantik di Istana. Jumlah itu tidak termasuk kepala daerah asal Aceh yang sudah dilantik lebih dahulu berdasar UU Keistimewaan Aceh. Ditemui sesuai pengecekan, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku kesehatan dirinya dan 1 Nyoman Giri Prasta cukup baik. Dia menyatakan siap mengikuti

pakai baju PDL. PDL-nya seragam pol PP, kayak pol PP kita," imbuhnya.

Koster menilai pembekalan kepala daerah adalah hal baik. Khususnya untuk membangun spirit kebangsaan, menyamakan visi, serta membangun keakraban antardaerah.

Persiapan serupa dilakukan gubernur terpilih Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Andi mengatakan, dalam retret nanti, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa semua aktivitas harus dilakukan sendir. Sebab, para peserta dilarang membawa ajudan ataupun keluarga. "Handphone masih boleh dibawa, ajudan tidak boleh," jelasnya.

Persiapan lainnya relatif tidak banyak. Hanya pakdalan dan kesiapan fisik. Ini dialami menyatakan, dari hasil pengecekan kesehatan, kondisinya cukup siap dan normal. "Mungkin hanya kolesterol agak sedikit tinggi," ujarnya. (far/c19/oni)

Sekda: Aktivasi IKD Hanya Offline dan Gratis

Marak Penipuan, Terbitkan Edaran untuk Antisipasi

SIDOARJO - Maraknya modus penipuan dengan dalih aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) membuat Pemkab Sidoarjo mengambil langkah tegas. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengeluarkan surat imbauan resmi untuk mengantisipasi kejahatan tersebut. "Kami mengingatkan ma-

maupun SMS. Bahkan, di daerah lain juga ditemui kasus penipuan serupa. Dia mengatakan, seluruh proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara offline di kantor Disdukcapil Sidoarjo, Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, Mini MPP Kecamatan Sukodono, dan di kantor kecamatan yang ada di Sidoarjo. Selain itu, ada saat kegiatan jemput bola-balaan perzinahan. "Proses aktivasi IKD hanya bisa dilakukan langsung di lokasi-lokasi tersebut oleh petugas Disduk-

capil," tegas Fenny.

Pemkab juga memastikan bahwa semua layanan Disdukcapil, termasuk aktivasi IKD, bersifat gratis. Jika ada pihak yang meminta biaya atau menawarkan bantuan aktivasi secara online, warga diminta segera melaporkan ke Disdukcapil, kantor desa atau kelurahan, kantor kecamatan, atau kepolisian setempat. Fenny berharap, dengan adanya imbauan tersebut masyarakat semakin waspada dan tidak mudah ter-tipu. (uzi/fal)

Proses aktivasi IKD hanya bisa dilakukan langsung di lokasi-lokasi tersebut oleh petugas disdukcapil."

FENNY APRIDAWATI Sekda Sidoarjo

Penipuan Mengatasnamakan Disdukcapil

- Pelaku menghubungi target melalui telepon, SMS, atau WhatsApp.
- Target diminta mengaktifasi identitas kependudukan digital.
- Pelaku meminta data pribadi target.



Sumber: Reposters Jawa Pos

Fenny mengatakan, Disdukcapil Sidoarjo tidak pernah menghubungi warga terlebih dahulu untuk menawarkan layanan atau meminta data pribadi melalui

pesan atau panggilan. Selama ini, oknum penipu mengatasnamakan Disdukcapil Sidoarjo untuk meminta data pribadi warga melalui pesan WhatsApp, telepon,



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sekda: Aktivasi IKD Hanya Offline dan Gratis

Marak Penipuan, Terbitkan Edaran untuk Antisipasi

SIDOARJO - Maraknya modus penipuan dengan dalih aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) membuat Pemkab Sidoarjo mengambil langkah tegas. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengeluarkan surat imbauan resmi untuk mengantisipasi kejahatan tersebut. "Kami mengingatkan ma-

Proses aktivasi IKD hanya bisa dilakukan langsung di lokasi-lokasi tersebut oleh petugas disdukcapil."

FENNY APRIDAWATI
Sekda Sidoarjo



asyarakat agar tidak mudah percaya jika dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari Disdukcapil Sidoarjo, terutama yang menawarkan bantuan aktivasi IKD," ujar Fenny. Surat imbauan tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (For-

kopimda) Sidoarjo, kepala perangkat daerah, direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), direktur BUMD, hingga kepala desa dan lurah di seluruh Sidoarjo. Pemkab berharap informasi tersebut bisa tersebar luas hingga ke masyarakat.

PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DISDUKCAPIL

- Pelaku menghubungi target melalui telepon, SMS, atau WhatsApp.
- Target diminta mengaktivasi identitas kependudukan digital.
- Pelaku meminta data pribadi target.

Sumber: Reportase Jawa Pos



maupun SMS. Bahkan, di daerah lain juga ditemui kasus penipuan serupa.

Dia mengatakan, seluruh proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara *offline* di kantor Disdukcapil Sidoarjo, Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, Mini MPP Kecamatan Sukodono, dan di kantor kecamatan yang ada di Sidoarjo. Selain itu, ada saat kegiatan jemput bola layanan perizinan. "Proses aktivasi IKD hanya bisa dilakukan langsung di lokasi-lokasi tersebut oleh petugas Disduk-

capil," tegas Fenny.

Pemkab juga memastikan bahwa semua layanan Disdukcapil, termasuk aktivasi IKD, bersifat gratis. Jika ada pihak yang meminta biaya atau menawarkan bantuan aktivasi secara *online*, warga diminta segera melaporkan ke Disdukcapil, kantor desa atau kelurahan, kantor kecamatan, atau kepolisian setempat.

Fenny berharap, dengan adanya imbauan tersebut masyarakat semakin waspada dan tidak mudah terpuji. (uzi/fal)

Jawa Pos

Frontage Road 2024 Tuntas, Siapkan Lelang untuk Anggaran 2025

Pembangunan Lanjutan Parsial di Waru dan Jenggolo

SIDOARJO - Pembangunan *frontage road* (FR) tahun anggaran 2024 tuntas. Selanjutnya, Pemkab Sidoarjo menyiapkan untuk lelang pembangunan *frontage road* lanjutan pada 2025.

Pada 2024, *frontage road* dikerjakan sepanjang 1.315 meter yang terbagi dalam dua sisi. Sisi utara dikerjakan sepanjang 545 meter dan sisi selatan 770 meter.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bi-



ANGGER BONDAN/JAWA POS

na Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo Rizal Asnan mengatakan, pengerjaan *frontage road* 2024 diberikan kompensasi untuk dilanjutkan pada awal 2025. Sebab, pekerjaan sebelumnya harus me-

nunggu proses pembebasan lahan kelar. Sekaligus proses relokasi utilitas seperti tiang listrik dan telepon. "Sekarang sudah sudah 100 persen," katanya.

Jalan baru tersebut sekarang bisa dilewati. Secara fisik su-

dah terbangun. Kondisi aspal juga telah dicek. Namun, masih ada pekerjaan untuk melengkapi alat kelengkapan jalan seperti rambu maupun markah jalan yang bakal dipenuhi dalam waktu dekat. Rizal mengatakan, saat ini

SUDAH MULUS: Kendaraan melintas di *frontage road* Buduran yang pengerjaannya telah selesai kemarin (17/2).

pihaknya tengah menyiapkan lelang pembangunan *frontage road* lanjutan. "Masih persiapan lelang untuk yang FR tahun ini," katanya.

Lokasi pembangunannya parsial, mulai di dekat pabrik paku di Waru dan di Jenggolo dekat Taman Asa Buduran. "Termasuk tahun ini ada pembangunan jembatan *frontage road* di atas sungai Buntung Waru," katanya.

Selain itu, ada pembangunan jembatan kecil *double u box* (DUB) di Jenggolo. "Lokasinya tersebar sesuai titik yang belum terbangun. Di Waru dan Buduran," kata Rizal. (uzi/fal)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ANGGARAN

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Digulirkan Lagi

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo tahun ini kembali menggulirkan program pagu indikatif wilayah kecamatan (PIWK). Fokusnya, penanganan jalan rusak dan kebersihan sungai. Anggaran PIWK bakal dialokasikan ke tiap kecamatan.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, lewat PIWK, masalah di tiap kecamatan bisa segera tertangani. "Misalnya, ada jalan rusak di wilayahnya, bisa langsung diperbaiki lewat PIWK," katanya.

Dengan demikian, tidak hanya menunggu dari dinas terkait untuk penanganannya. "Sehingga kecamatan bisa respons lebih cepat," imbuh Subandi. Sebab, salah satu fungsi PIWK adalah pihak kecamatan dapat melakukan pemeliharaan jalan dan pemeliharaan saluran. Saat ini mekanisme pelaksanaannya masih dalam pembahasan.

Camat Tanggulangin Sabino Mariano mengatakan, kegiatan penanganan di kecamatan menggunakan PIWK berbeda-beda. "Ada yang untuk pembersihan sungai maupun perbaikan jalan," katanya.

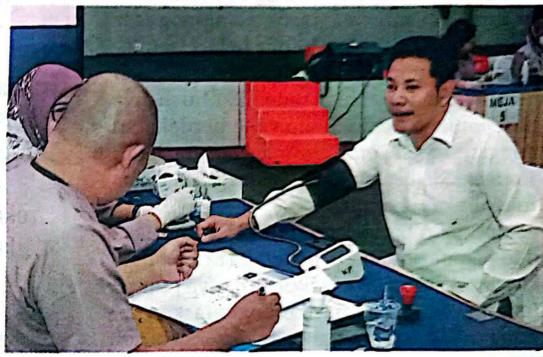
Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di tiap kecamatan. "Untuk pelaksanaannya, kami masih menunggu instruksi dari kabupaten," tandasnya. (uzi/fal)

Siap Dilantik, Subandi-Mimik Komitmen Efisiensi Anggaran

Juga Dukung Program Ketahanan Pangan

SIDOARJO - Pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Sidoarjo Subandi-Mimik Idayana memastikan kesiapannya menjelang pelantikan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Setelah menjalani tes kesehatan, keduanya dinyatakan sehat dan siap memimpin Sidoarjo.

"Alhamdulillah semua lancar dan hasilnya baik," ujar Subandi didampingi Mimik Idayana dalam keterangannya kepada media. Usai dilantik, Subandi dan Mimik akan mengikuti retreat di Magelang bersama kepala daerah lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan



DINYATAKAN SEHAT: Subandi (foto kanan) dan Mimik Idayana mengikuti tes kesehatan di Kemendagri.

orientasi dan pembekalan bagi para pemimpin daerah.

Jelang dilantik, kepala daerah diminta komitmennya untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. "Kami siap men-

jalankan semua perintah dan kebijakan yang diambil untuk bangsa," katanya. Selain itu, Subandi menyatakan kesiapan mendukung program ketahanan pangan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Dalam upaya efisiensi, Pem-

kab Sidoarjo bersama DPRD telah sepakat menghapus seremonial yang dinilai tidak efisien. Selain itu, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat. "Kami ber-

terima kasih kepada DPRD Sidoarjo. Komunikasi antara tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo juga berjalan lancar dan efisiensi ini sudah disepakati bersama," tandas Subandi. (uzi/fal)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

Nasional

Retret, Kada Dilarang Bawa Ajudan

Hasil Tes Kesehatan, Banyak Kepala Daerah Berkolesterol Tinggi

JAKARTA - Para kepala daerah (kada) terpilih telah menuntaskan pengecekan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin (17/2). Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan menjelang pelantikan serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2) dan retret di Magelang pada 21-28 Februari.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, dari 962 kepala daerah dan wakilnya yang akan dilantik, hanya 17 yang berhalangan hadir karena berbagai alasan. Mereka akan mengikuti tes kesehatan susulan di Magelang.

Bima mengatakan, hasil pengecekan kesehatan akan menjadi dasar dalam menentukan aktivitas fisik di Magelang. Mereka yang



HUMAS KEMENDAGRI
HARI KEDUA: Wamendagri Bima Arya (kanan) meninjau pemeriksaan kesehatan terhadap kepala daerah terpilih di kantor Kemendagri Jakarta kemarin (17/2).

memiliki riwayat operasi dalam enam bulan terakhir, misalnya, akan mendapat catatan khusus. "Karena kesehatan yang utama," ujarnya kemarin.

Secara umum, para kepala daerah dalam kondisi sehat. Kalaupun ada catatan, angka kolesterol tinggi. Ini dialami sekitar 30 persen kada. "Ada juga yang angka asam urat dan kadar gula agak sedikit di atas," imbuhnya.

Setelah tes kesehatan, hari ini para kepala daerah akan

melaksanakan gladi kotor pelantikan di Monas. Lalu, dilanjutkan gladi bersih pada Rabu besok. Total ada 481 kepala daerah yang akan dilantik di Istana. Jumlah itu tidak termasuk kepala daerah asal Aceh yang sudah dilantik lebih dahulu berdasar UU Keistimewaan Aceh.

Ditemui sesuai pengecekan, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku kesehatan dirinya dan I Nyoman Giri Prasta cukup baik. Dia menyatakan siap mengikuti

pelantikan ataupun pembekalan di Magelang. "Nggak ada persiapan khusus. Karena saya lima tahun jadi gubernur tidak pernah sakit," ujarnya.

Terkait kesiapan perlengkapan, Koster akan mengikuti arahan Kemendagri. Khususnya terkait dengan kostum. Dia mengaku sudah diminta mempersiapkan pakaian olahraga, batik untuk ramah-tamah, hingga PDL kepala daerah. "Baju pertama waktu datang itu

pakai baju PDL. PDL-nya seragam pol PP, kayak pol PP kita," imbuhnya.

Koster menilai pembekalan kepala daerah adalah hal baik. Khususnya untuk membangun spirit kebangsaan, menyamakan visi, serta membangun keakraban antardaerah.

Persiapan serupa dilakukan gubernur terpilih Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Andi mengatakan, dalam retret nanti, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa semua aktivitas harus dilakukan sendiri. Sebab, para peserta dilarang membawa ajudan ataupun keluarga. "Handphone masih boleh dibawa, ajudan tidak boleh," jelasnya.

Persiapan lainnya relatif tidak banyak. Hanya pakaian dan kesiapan fisik. Andi menyatakan, dari hasil pengecekan kesehatan, kondisinya cukup siap dan normal. "Mungkin hanya kolesterol agak sedikit tinggi," ujarnya. (far/c19/oni)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

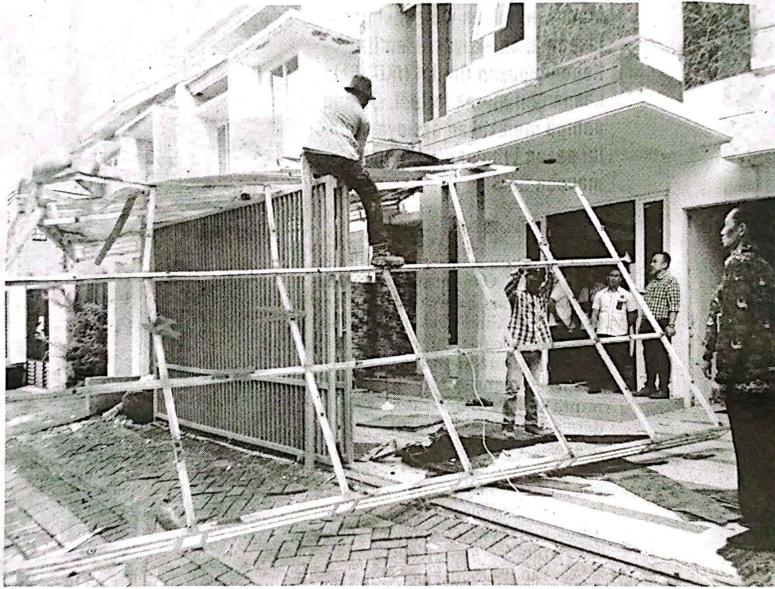
Rumah Dua Lantai di Waru Dieksekusi Pengadilan Negeri

WARU-Sebuah rumah dua lantai di Perum Delta Sari Regency, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dieksekusi pada Senin (17/2) oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Pantauan Radar Sidoarjo di lokasi, dalam agenda eksekusi tersebut, pihak termohon tidak tampak di lokasi. Barang-barang milik termohon yang berada di dalam rumah juga sudah tidak ada, dan rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong.

Namun, sejumlah perlengkapan rumah tampak dirusak oleh termohon, seperti kanopi, tangga, dan pintu. Akibatnya, petugas eksekusi terpaksa memanggil tukang las untuk memotong besi kanopi yang ambruk akibat dirusak. Meskipun begitu, proses eksekusi rumah ini mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian.

Juru Sita PN Sidoarjo, Rudy Hartono, menjelaskan bahwa eksekusi pengosongan rumah tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Eksekusi ini berdasarkan perkara nomor 23 eksekusi



AMAN: Proses Eksekusi rumah di Perum Delta Sari Regency, Kureksari, Waru, Senin (17/2).

tahun 2023, yang merupakan pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi," ujarnya.

Perkara ini diajukan oleh

Suhendro sebagai pemohon eksekusi melawan Sipora Yesi Mela sebagai termohon eksekusi. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi pada 2023, sesuai dengan

putusan pengadilan perkara nomor 305/Pdt.G/2021/PN.Sda jo nomor 408/Pdt/2022/PT.Sby jo 912 K/Pdt./2023.

"Pelaksanaan eksekusi ini sesuai dengan perintah dan

surat tugas dari Ketua PN Sidoarjo," terangnya.

Rudy mengungkapkan bahwa Ketua PN Sidoarjo sebelumnya telah mengeluarkan Aanmaning atau teguran kepada termohon agar menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan. Namun, karena termohon tidak melaksanakan putusan tersebut, maka penetapan dan surat tugas dikeluarkan untuk melaksanakan eksekusi.

"Walaupun pada hari ini, termohon ingin menyerahkan dan mengosongkan objek rumah secara sukarela, objek sudah dalam keadaan kosong, namun ada kerusakan. Kami hanya melaksanakan penetapan dan surat tugas yang diberikan oleh Ketua PN Sidoarjo," tegasnya.

Eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan di Perumahan Delta Sari Regency, Kureksari, Waru, dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1977/Kelurahan Kureksari, Surat Ukur tanggal 22-12-2005, dengan luas 160 meter persegi yang tercatat atas nama Suhendro. (dik/vga)

Satlantas Urai Kemacetan di Bawah Flyover Waru

KEPADATAN lalu lintas selalu terjadi di simpang tiga bawah jembatan layang Waru, Sidoarjo, setiap pagi. Hal ini menjadi perhatian serius Satlantas Polresta Sidoarjo. Dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2025, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di lokasi tersebut.

Satlantas Polresta Sidoarjo turun langsung untuk melakukan rekayasa pada lampu lalu lintas (traffic light/TL) di simpang tiga jembatan layang Waru, Sidoarjo. Rekayasa yang dilakukan berupa penambahan durasi lampu hijau untuk kendaraan yang melaju dari Sidoarjo menuju Surabaya, pada Senin (17/2) pagi.

"Kami melakukan rekayasa dengan menambah durasi lampu hijau untuk kendaraan yang melaju dari selatan ke utara," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing melalui Kasatlantas AKP Jodi Indrawan.

Ia menjelaskan, rekayasa ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan



URAI KEMACETAN: Satlantas Polresta Sidoarjo laksanakan rekayasa di bawah Flyover Waru.

lalu lintas setiap pagi, terutama saat jam berangkat kerja. Penambahan durasi lampu hijau tersebut diterapkan mulai pukul 06.00 hingga 09.00. Rekayasa ini diharapkan dapat mengurai kepadatan yang terjadi di lo-

kasi tersebut.

"Lampu hijau dari arah Sidoarjo ke Surabaya kami tambah dari semula 60 detik menjadi 180 detik. Hal ini menyebabkan durasi lampu merah dari arah Medaeng menuju timur

juga bertambah," tuturnya.

AKP Jodi Indrawan menambahkan, berdasarkan uji coba yang dilakukan, rekayasa ini terbukti efektif untuk mengurangi kemacetan, terutama saat jam berangkat kerja dan sekolah. Namun, pihaknya masih terus melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas rekayasa tersebut.

"Evaluasi terus kami lakukan. Kami ingin memastikan anak sekolah dan pekerja yang berangkat pada pagi hari dapat merasa nyaman dan tidak terjebak kemacetan," ungkapnya.

Sementara itu, seorang pengemudi bus, Supardi (50), mengungkapkan rasa terima kasih atas rekayasa yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Sidoarjo. "Ini sangat baik, dan kami berharap dapat memecahkan masalah kemacetan serta pelanggaran yang sering terjadi di bawah jembatan layang Waru, Sidoarjo," ujarnya. (gun/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner



Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan

Modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melakukan aksinya melalui pesan WhatsApp, telepon, maupun SMS.

M Saiful Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

HAL ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipu mengaku dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo dan menawarkan bantuan untuk mengaktifkan IKD.

Korban yang dihubungi diminta untuk menyerahkan data pribadi mereka untuk proses aktivasi IKD. Namun, data pribadi yang diperoleh digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan tindak kejahatan.

"Atas maraknya kejahatan tersebut, Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat imbauan untuk waspada terhadap penipuan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo," ujar Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, pada Senin (17/2/2025).

Dalam surat tersebut, Pemkab Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati. Masyarakat diminta untuk waspada jika dihubungi oleh seseorang yang menawarkan



WASPADA: Plt Bupati Sidoarjo saat mengecek Identitas Kependudukan Digital ke warga.

bantuan untuk aktivasi IKD.

"Jangan percaya meskipun oknum penipu tersebut mengaku sebagai pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo," pesan Sekda.

Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala

Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, serta Kepala Desa atau Lurah se-Kabupaten Sidoarjo.

Surat yang dikeluarkan pada 13

Februari 2025 ini diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, disampaikan beberapa informasi agar masyarakat tidak

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Aktivasi IKD...

menjadi korban penipuan aktivasi IKD.

Pertama, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan layanan atau meminta data pribadi

melalui WhatsApp, telepon, atau SMS.

Setiap layanan yang diberikan hanya dapat diakses langsung oleh masyarakat di kantor Disdukcapil Sidoarjo atau melalui saluran resmi yang telah ditentukan.

Kedua, aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kabu-

paten Sidoarjo secara langsung, bukan melalui media online, telepon, video call, atau share screen. Ditegaskan bahwa tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui WhatsApp atau SMS.

Selain itu, pengaktifan IKD hanya dapat dilakukan di Kantor Dis-

dukcapil Sidoarjo, Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, Mini Mall Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono, serta kantor kecamatan setempat.

Seluruh layanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bersifat gratis. Apabila ada pi-

hak yang menghubungi dan mengaku sebagai petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, masyarakat diminta untuk segera melapor ke Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, pihak Desa/Kelurahan, pihak Kecamatan, atau Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. (sai/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner



Rumah Tidak Layak Huni Milik Selamin Mulai Diperbaiki

SIDOARJO - Pasca viral diberitakan di media terkait kondisi rumahnya yang hancur dan atap bocor setiap hujan turun, rumah tidak layak huni (RTLH) milik Pak Selamin (70), warga RT 6 RW 2, Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, kini sudah dalam perbaikan, Senin (17/2/25).

Sebelumnya diberitakan, RTLH milik warga Desa Randegan mendapat perhatian dengan didatangi Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni, bersama anggota, Sekcam Tanggulangin, Kades Randegan, dan perwakilan Dinas Sosial serta Baznas (Badan Zakat Nasional).

Kini Selamin sudah bisa bernapas lega dan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada banyak pihak setelah rumahnya mulai diperbaiki.

Selamin (70), warga Desa Randegan, RT 6 RW 2, Kecamatan Tanggulangin, pemilik RTLH yang kini sudah direnovasi melalui program perbaikan RTLH, menyampaikan rasa sangat berterima kasih.

“Saya ingin tidak sampai ke-bocoran, pintu-pintu sudah rapuh semua. Dan saya sampaikan terima kasih serta sukur kepada

Kabupaten Sidoarjo yang sudah membantu, khususnya Kepala Dinas Sosial dan Baznas Sidoarjo, sehingga rumah saya bisa dibangun sesuai dengan janjinya yang insyaallah sebelum lebaran,” terang Selamin, Senin (17/2/25).

“Jadi intinya saya sangat senang dengan bantuan perbaikan rumah yang saat ini sudah dikerjakan mulai Sabtu kemarin, sehingga tidak bocor lagi,” ungkap Selamin.

M. Lazim, Ketua RT 6 RW 2 Desa Randegan, kepada Duta Masyarakat, Senin (17/2/25), mengatakan, “Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak yang ikut memperhatikan dan membantu jalannya prosesi pengajuan bantuan renovasi rumah terkait rumah tidak layak huni (RTLH) bagi setiap warga kurang mampu, khususnya warga di sini.”

“Karena harapan warga tersebut kini sudah terealisasi dengan dibangunnya dua rumah warga kami,” ungkap M. Lazim.

“Harapannya semoga program yang baik tersebut bisa berjalan lancar dan berkembang terus dalam hal kualitas, sehingga bisa benar-benar dinikmati oleh setiap warga yang membutuh-

terima kasih serta syukur kepada Allah SWT, kepada pemerintah

setiap warga yang memotivasi kan," harap M. Lazim. ● Loe



LOETFU/DUTA

Pak Selamin menunjukkan RTLH miliknya yang sedang diperbaiki Senin (17/2/25).

CS Dipindai dengan CamScanner

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kabupaten Sidoarjo Siap Diperiksa BPK RI

Sidoarjo, Bhirawa

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan Pemkab Sidoarjo siap untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan anggaran tahun 2024.

Hal ini disampaikan Subandi, Jumat (14/2) lalu, disela-sela menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Jawa Timur, yang berlokasi di Jl Raya Juanda, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.

Dalam penyerahan LKPD 2024 itu, Subandi, juga didampingi Sekdakab Feny Apridawati, Kepala Inspektorat Andjar Surjadiyanto dan Kepala BPKAD Sidoarjo Chusnul Inayah. Penyerahan



Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, menyerahkan LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 kepada Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur.

LPKD Pemkab Sidoarjo itu, diterima Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah, menurut Subandi, menjadi kewajiban utama pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Sebagaimana

Permendagri Nomor 77 tahun 2020, laporan keuangan Pemerintah daerah, harus disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Penyusunan LPKD ini menjadi instrumen penting dalam transparansi dan akuntabilitas Pemerintah, juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah," komentarnya.

Subandi juga menyampaikan terima kasih kepada BPK telah kerja sama dalam melakukan pendampingan kepada Pemkab Sidoarjo terkait tata kelola keuangan yang benar sesuai dengan aturan perundang undangan. Diharapkan hasil LKPD tahun 2024 Kabupaten Sido-

arjo kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Jika ini bisa kita capai, akan menjadi yang ke 12 kali, LKPD Sidoarjo telah berturut-turut berhasil meraih Opini WTP," ujarnya.

Pemkab dan seluruh masyarakat Sidoarjo, tegasnya hendaknya bersyukur kalau opini WTP bisa diraih kembali, karena Pemkab Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP ini sejak dimulai tahun 2013 lalu.

"Kami akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertahankan opini WTP ini pada tahun-tahun berikutnya. Hasil ini merupakan kerja keras maka harus terus dipertahankan," tandasnya. [kus.fen]

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa

Wahai Rakyat Kita Berdaya



Subandi dan Mimik Idayana usai tes kesehatan di Kantor Kemendagri di Jakarta, Minggu (16/2). Foto: istimewa

Subandi-Mimik Siap Jalani Pelantikan dan Retret

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Subandi-Mimik Idayana menyatakan siap mengikuti pelantikan dan acara retret.

Keduanya telah menjalani tes kesehatan pada Minggu (16/2) kemarin di Kantor Kemendagri di Jakarta.

Tes kesehatan ini menjelang persiapan pelantikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih se-Indonesia pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta.

Subandi mengaku bersyukur karena proses tes kesehatan semuanya berjalan baik dan lancar. Dia dan Mimik Idayana pun siap menjalani

pelantikan. "Alhamdulillah semua lancar dan hasilnya juga baik semua," kata Subandi didampingi Mimik Idayana.

Setelah pelantikan di Istana Negara, Bupati dan Wabup Sidoarjo juga akan menjalani retret ke Magelang bersama para kepala daerah lainnya.

Di sana, mereka akan menjalani orientasi, pembekalan, dan pelatihan untuk pemimpin daerah.

Soal kebijakan presiden dalam hal efisiensi, Plt Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan dirinya patuh dan siap melaksanakan Inpres 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran.

Program-program Presiden Prabowo Subianto terkait ketah-

anan pangan juga didukung seperti perintah dalam Inpres nomor 2 Tahun 2025.

"Kami sebagai kepala daerah Sidoarjo, selalu mendukung program Pak Presiden. Menjalankan semua perintah dan kebijakan yang diambil untuk bangsa Indonesia," ujar Subandi.

Subandi juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Sidoarjo. Sebab, komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo berjalan lancar. Baik eksekutif maupun legislatif sepakat melaksanakan efisiensi anggaran. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Subandi - Mimik Idayana, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih menjalani tes kesehatan menjelang pelantikan 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. (foto : H. Dar/wartanusa.net)

Latest

Pemerintahan

Tes Kesehatan Baik, Subandi – Mimik Siap Ikuti Pelantikan dan Retret di Magelang

📅 17 Februari 2025 👤 wartanusa 📍 Subandi - Mimik Siap Ikuti Pelantikan dan Retret di Magelang, Tes Kesehatan Baik

Sidoarjo – wartanusa.net

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Subandi – Mimik Idayana telah menjalani tes kesehatan, Minggu (16 Februari 2025). Tes kesehatan pasangan kepala daerah terpilih itu dilakukan menjelang persiapan pelantikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih se-Indonesia pada 20 Februari di Istana Negara Jakarta.

Subandi mengaku bersyukur karena proses tes kesehatan semuanya berjalan baik dan lancar. Ia dan Mimik Idayana pun siap menjalani pelantikan.

“Alhamdulillah semua lancar dan hasilnya juga baik semua,” kata Subandi yang didampingi Mimik Idayana.

Setelah pelantikan di Istana Negara, Bupati dan Wabup Sidoarjo juga akan menjalani retret ke Magelang bersama para kepala daerah lainnya.

 wartanusa.com

Di sana, mereka akan menjalani orientasi, pembekalan, dan pelatihan untuk pemimpin daerah. Bersama kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, mereka akan banyak menerima materi.

Ditanya tentang kebijakan presiden dalam hal efisiensi, Plt Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan dirinya patuh dan siap melaksanakan Inpres 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran.

Program-program Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan juga didukung seperti perintah dalam Inpres nomor 2 Tahun 2025.

"Kami sebagai kepala daerah Sidoarjo, selalu mendukung program Pak Presiden. Menjalankan semua perintah dan kebijakan yang diambil untuk bangsa Indonesia," ujar Subandi.

Dalam kesempatan yang sama, Subandi juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Sidoarjo. Sebab, komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo berjalan lancar. Baik eksekutif maupun legislatif sepakat melaksanakan efisiensi anggaran.

"TAPD dan Banggar telah berkomunikasi untuk melakukan pembahasan. Yang pasti, anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak efisien sudah tidak ada lagi di Sidoarjo," tandasnya.

Selain efisiensi anggaran terhadap kegiatan seremonial, lanjut Subandi, TAPD dan Banggar juga menyepakati pengurangan anggaran perjalanan dinas (perdin). Efisiensi anggaran perdin dilakukan 50 persen seperti perintah Inpres 1 Tahun 2025.(dar/nata/red)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Masyarakat Untuk Waspada

Breaking News, Budaya, Centra Berita TV, Daerah, Hukum, Infrastruktur, Kesehatan, Kuliner, Pendidikan, Religi, Sejarah |

17 Februari 2025 | PARMAN PARMAN CB | Leave a comment



Sidoarjo, Centralberitanews.com — Modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melancarkan aksi jahatnya melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS.



Sidoarjo, Centralberitanews.com — Modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melancarkan aksi jahatnya melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS.

Hal itu juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipu mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo untuk menawarkan pelayanan aktivasi IKD.

The infographic features a purple background with a white smartphone in the center displaying the Garuda logo and the text 'Menteri Kependudukan Digital'. At the top, it includes logos for 'BerAKHLAK' and 'disdukcapil'. The main title is 'IKD jadi modus penipuan'. Below this, a yellow banner reads 'MODUS PENIPUAN' with 'MELALUI TELEPON' and 'MELALUI WHATSAPP' on either side, and 'ABAIKAN SEGERA!' in the middle. The text explains that IKD activation does not require data verification via phone or WhatsApp and is only done offline by Disdukcapil staff. It lists locations: MPP Lingkar Timur, Mini MPP Sukodono, Kantor Disdukcapil Jl. Sultan Agung, and Kecamatan Setempat (domisili). It also states that data entry is done via the IKD app. At the bottom, it provides the website 'disdukcapil.sidoarjakab.go.id' and social media handles for YouTube, Facebook, and Instagram.

IKD jadi modus penipuan

MELALUI TELEPON **ABAIKAN SEGERA!** **MELALUI WHATSAPP**

MODUS PENIPUAN

Aktivasi IKD (KTP Digital) tidak pernah memerlukan verifikasi data melalui TELEPON atau PESAN WHATSAPP yang mengatasnamakan Disdukcapil Sidoarjo.

Aktivasi IKD hanya dilakukan secara langsung (offline) oleh petugas Disdukcapil:

- MPP Lingkar Timur
- Mini MPP Sukodono
- Kantor Disdukcapil Jl. Sultan Agung
- Kecamatan Setempat (domisili)

Pengisian data hanya melalui Aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)

disdukcapil.sidoarjakab.go.id

dukcapilsda disdukcapilsidoarjo

Korban yang dihubungi diminta menyerahkan data pribadinya untuk dibantu melakukan aktivasi IKD. Namun data pribadi korban digunakan oknum penipu untuk tindak kejahatan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

'Atas maraknya kejahatan tersebut Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat himbauan waspada penipuan di Kabupaten Sidoarjo,' kata Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Senin (17/2/2025).



Dalam surat tersebut Pemkab Sidoarjo mengingatkan masyarakat Sidoarjo untuk berhati-hati. Masyarakat diminta waspada jika dihubungi seseorang yang menawarkan bantuan melakukan aktivasi IKD.

'Jangan percaya meski oknum penipu tersebut mengatasnamakan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo,' pesan Sekda.

Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo. Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten



Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten Sidoarjo serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sidoarjo dan Kepala desa atau Lurah se- Kabupaten Sidoarjo.

Advertisement



Surat yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2025 kemarin diharapkan tersampaikan juga kepada masyarakat luas.

Baca juga : [Wabup Subandi Berpesan untuk Kuatkan koordinasi dan konsolidasi Pada Bintek Desa Pabean](#)

Dalam surat yang ditandatangani Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati itu menginformasikan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan tersebut.

Disampaikan beberapa informasi agar tidak menjadi korban penipuan aktivasi IKD. Yang pertama Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi melalui pesan WhatsApp, telepon, atau SMS.

Setiap layanan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara langsung di kantor Disdukcapil Sidoarjo atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dalam surat yang ditandatangani Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati itu menginformasikan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan tersebut.

Disampaikan beberapa informasi agar tidak menjadi korban penipuan aktivasi IKD. Yang pertama Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi melalui pesan WhatsApp, telepon, atau SMS.

Setiap layanan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara langsung di kantor Disdukcapil Sidoarjo atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.

Kedua aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Proses aktivasi IKD sendiri dilakukan secara offline, bukan melalui media online, telepon, video call, dan share screen. Ditegaskan bahwa tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui WhatsApp atau SMS.

Diinformasikan juga bahwa pengaktifasian IKD hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Mall Pelayanan Publik/MPP Lingkar Timur, Mini Mall Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono serta kantor kecamatan setempat.

Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bersifat gratis. Jika ada pihak yang menghubungi dan mengaku sebagai petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo agar segera melaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo atau pihak Desa/Kelurahan, pihak Kecamatan maupun Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. (git/mas)

